

6 Oknum TNI Aniaya Relawan Ganjar, Terancam Hukuman 5 Tahun Penjara

SEMARANG (IM) - Enam oknum prajurit TNI AD, Kompi B Bataylon Infantri (Yoinf) Raider 408/Suhbrastha, tersangka penganiayaan terhadap relawan Ganjar Pranowo - Mahfud MD, dijerat pasal berlapis. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara.

"Disanggakan Pasal 170 (KUHP) dan Pasal 351 (KUHP). Kalau Pasal 170 maksimal 5 tahun (penjara), kalau Pasal 351 lihat ringan beratnya, ada yang dua tahun, kalau sampai luka berat, meninggal dunia, bisa sampai 7 tahun," ungkap Komandan Polisi Militer Daerah Diponegoro, Kolonel CPM Rinoso Budi, saat diwawancara di CFD Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Minggu

(14/1) pagi. Rinoso menjelaskan bahwa hasil visum tim dokter, tidak ada korban ada yang mengalami luka dalam ataupun patah tulang. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan akan dimasukkan dalam berkas penuntutan. Tentunya hal ini akan jadi pertimbangan hakim militer di persidangan nanti.

Insiden penganiayaan itu terjadi di depan Markas Kompi B Yonif Raider 408/Suhbrastha, Kabupaten Boyolali, Sabtu (30/12) siang. Enam tersangka yang sudah ditetapkan masing-masing: Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F dan Prada M. Semuanya ditahan di Denpom IV/4 Surakarta. ● han

Kejaksaaan Limpahkan Kasus Senjata Ilegal Dito ke Pengadilan

JAKARTA (IM) - Berkas perkara dan dakwaan kasus kepemilikan senjata api ilegal yang menjerat pengusaha Dito Mahendra telah dilimpahkan Tim Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Kejari Jakarta Selatan juga telah menyerahkan barang bukti serta memberikan wewenang penahanan terhadap Dito Mahendra. Pelimpahan dilakukan pada Kamis (4/1) lalu.

"Hari Kamis tanggal 4 Januari lalu, berkas perkara Dito Mahendra sudah kami serahkan ke pengadilan," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jaksel, Haryoko Ari Prabowo kepada wartawan, Sabtu (13/1).

Haryoko menjelaskan bahwa empat orang jaksa telah ditugaskan untuk menangani perkara ini, dan proses pelimpahan ke pengadilan dilakukan pada tanggal yang sama.

Kekasih dari penyanyi Nindy Ayunda itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 17 Maret 2023 terkait kasus

senjata api ilegal. Kasus kepemilikan sejumlah senjata api terungkap saat penyidik KPK melakukan pengeledahan di rumah Dito Mahendra, Jalan Erlangga V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 3 Maret 2023. Pengeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh eks Sekretaris MA Nurhadi.

Di rumah Dito ditemukan 115 senjata api, di mana 9 di antaranya dinyatakan ilegal. Kesembilan senjata api ilegal tersebut melibatkan berbagai jenis, seperti 1 pucuk Pistol Glock 17, 1 pucuk Revolver S&W, 1 pucuk Pistol Glock 19 Zev, 1 pucuk Pistol Angstadt Arms, dan 1 pucuk Pistol Heckler & Koch MP 5.

Kemudian satu Senapan Noveske Refleworks, 1 pucuk Senapan AK 101, 1 pucuk Senapan Heckler & Koch G 36, dan 1 pucuk senapan angin Walther, beserta ratusan butir amunisi. Dito Mahendra dijerat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api sebagai konsekuensi dari kasus tersebut. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



GANJAR MENGIKUTI LARI PAGI

PENGUN SELIWERUN Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah) mengikuti kegiatan Penguin Seliwerun di Senayan Park, Jakarta, Minggu (14/1). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengajak masyarakat menjalani hidup sehat dan sebagai simbol dari program Gerak Cepat (Gercep) yang diusung Pasangan Capres Cawapres nomor urut 3.

Muncul Wacana Pemakzulan Presiden Jelang Pemilu, Jimly: Ada yang Takut Kalah

Gerakan 22 tokoh dari Petisi 100 yang minta pemakzulan Presiden Jokowi adalah inkonstitusional, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 1945.

JAKARTA (IM) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menyoroti munculnya gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa hari terakhir ini. Jimly menilai, ide pemakzulan sengaja dihindarkan untuk mengalihkan perhatian karena ada yang takut kalah.

Hal ini disampaikan Jimly dalam akun X resminya, @JimlyAs, seperti dikutip Minggu (14/1). Jimly mengaku bingung dengan ide pemakzulan Jokowi yang muncul jelang Pemilu.

"Aneh, 1 bulan ke pemilu kok ada ide pemakzulan presiden. Ini tidak mungkin, kecuali cuma pengalihan perhatian atau karena pendukung paslon, panik dan takut kalah," tulis Jimly. Jimly telah mengizinkan

cuitannya dikutip. Menurut Jimly, waktu satu bulan tidak cukup untuk mengumpulkan sikap resmi DPR dan MPR. Oleh sebab itu, Jimly meminta agar seluruh pihak fokus saja dalam menyukseskan Pemilu 2024.

"Satu bulan ini, mana mungkin dicapai sikap resmi 2/3 anggota DPR dan dapat dukungan 2/3 anggota MPR setelah dari MK. Mari fokus saja sukseskan pemilu," kata Jimly. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menerima kedatangan 22 tokoh dari Petisi 100 di kantornya. Mereka datang untuk mengu-

sulkan pemakzulan Presiden Jokowi.

"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," kata Mahfud Md saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1).

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai gerakan tersebut inkonstitusional karena tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7B UUD 1945.

"Prosesnya harus dimulai dari DPR yang mengeluarkan pernyataan pendapat bahwa Presiden telah melanggar Pasal 7B UUD 45, yakni melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. Tanpa uraian yang jelas aspek mana dari Pasal 7B UUD 45 yang dilanggar presiden, maka langkah pemakzulan adalah langkah inkonstitusional," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Minggu (14/1).

Awiek pun menegaskan ide pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merupakan ranah yang berbeda dengan kontestasi pemilu. Dia pun mempertanyakan kenegaraan Jimly.

"Itu ranah yang berbeda, kalau takut kalah itu kan kontestasi pemilu, tapi kalau soal ada usulan, ada wacana pemakzulan itu kan pendapat, tapi harus melalui prosedur yang panjang dan tidak serta merta pemakzulan itu selesai dengan pendapat," ujarnya. ● han

Awiek pun menegaskan ide pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merupakan ranah yang berbeda dengan kontestasi pemilu. Dia pun mempertanyakan kenegaraan Jimly.

"Itu ranah yang berbeda, kalau takut kalah itu kan kontestasi pemilu, tapi kalau soal ada usulan, ada wacana pemakzulan itu kan pendapat, tapi harus melalui prosedur yang panjang dan tidak serta merta pemakzulan itu selesai dengan pendapat," ujarnya. ● han

Pantun Prabowo: "Tak Perlu Banyak Kata, Prabowo-Gibran akan Kerja Nyata ..."

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, melakukan konsolidasi bersama Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), relawan, dan warga Sumut, yang digelar di Gelanggang Olah Raga (GOR) Pancing, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (13/1).

Saat tiba di Bandara Bandara Kualanamu, Prabowo disambut massa yang antusias mendukungnya. Saat tiba di GOR, Prabowo langsung disambut dengan berbagai atraksi, seperti tari reog dan barongsai.

Dihadapan massa pendukungnya, mantan Pangkostrad itu melantunkan dua pantun. Lewat pantun itu, Prabowo memastikan bahwa dirinya bersama Gibran akan bekerja nyata, seperti masyarakat Sumatera Utara yang terkenal akan kesetiaan dan kejujurannya.

"Terima kasih rakyat Sumatera Utara. Terima kasih dukunganmu. Terima kasih komitmenmu. Saya merasa kuat diterima Saudara. Sebe-

lum selesai, izinkan saya berpantun dulu," kata Prabowo. "Anak Medan merantau ke Jakarta. Pulang ke rumah dipanggil orangtua. Kita tak perlu banyak kata. Prabowo-Gibran akan kerja nyata," ucap Prabowo, yang langsung disambut tepuk tangan meriah oleh massa pendukungnya. "Sumatera Utara warganya setia. Suka berkata jujur apa adanya. Kalau ada yang menjelek-jelekkan kita dan kasih nilai rendah kepada kita, jogetin aja!" kata Prowo di pantun keduanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta Sumatera Utara agar senantiasa menjaga kerukunan dan tidak membalas kebaikan dengan penghinaan.

"Jangan menjadi Malin Kundang. Jangan kebaikan kita balas dengan pengkhianatan, jerih payah dibalas dengan kedengkian," tegas Prabowo.

Menurutnya, pembangunan negara bertujuan untuk memakmurkan negara sehingga masyarakat hidup sejahtera. Jadi, negara merdeka

adalah negara yang tidak memiliki rakyat miskin. Oleh karena itu, Prabowo berharap, seluruh elemen masyarakat bisa memperjuangkan kemakmuran sekuat tenaga. Prabowo juga menilai bahwa para pemimpin Indonesia terdahulu juga memberikan landasan keamanan yang baik. "Kita bersyukur, pemimpin kita telah menjaga Republik ini dengan menghindar dari peperangan," kata Prabowo.

Prabowo bersama calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka, serta Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkomitmen untuk membawa Indonesia menjadi negara yang hebat, adil, dan makmur.

seluruh relawan, semua Koalisi Indonesia Maju, termasuk yang berada di ruangan ini pula (untuk) gerakkan tetangga-tetangamu, yakinkan saudara-saudaramu, yakinkan bahwa Prabowo-Gibran dan KIM bertekad membawa Indonesia ke negara yang hebat, adil, dan makmur," tegas Prabowo. ● han



KAMPANYE PRABOWO DI KABUPATEN BANDUNG Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kampanye di Soreang, Kab. Bandung, Jabar, Minggu (14/1). Dalam kampanyenya, Prabowo berkesempatan untuk menghadiri Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara yang menyatakan dukungannya kepada Prabowo - Gibran.

Jika AMIN Menang, Cak Imin Janjikan Rp150 T dari APBN untuk Anak Muda

PASURUAN (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin) berjanji akan memberikan anggaran sebesar Rp150 triliun khusus untuk anak-anak muda jika pasangan AMIN (Anies- Cak Imin) menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Cak Imin mengaku bahwa anggaran Rp150 triliun itu telah dihitungnya bersama Anies Baswedan. Dananya akan diambil dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

"Kulo kaliyan (saya dan) Mas Anies sampun (sudah) menghitung, sebetulnya anggaran APBN kita ini Rp3.000 triliun kalau benar-benar dihitung dan dimanfaatkan dengan baik," ujar Cak Imin saat memberikan sambutan di acara haul Masyayikh Ke-21 dan Silaturrohim Nasional Alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (14/1).

"Insy Allah, khusus kaum muda kita bisa alo-

kasikan minimal Rp150 triliun untuk anak-anak muda maju dan menghasilkan produktivitas kita jadi lebih tinggi lagi," kata Cak Imin.

Cak Imin menambahkan bahwa pengembangan potensi anak-anak muda Indonesia menjadi salah satu perhatian pasangan Amin dalam wacana perubahan. Terlebih, saat ini, jumlah anak muda Indonesia sekitar 52 persen dari komposisi penduduk Indonesia.

"Kaum muda Indonesia ini jumlahnya terbesar, terbanyak di Indonesia. Jumlah anak muda sudah sampai 52 persen. Ini energinya kuat. Satu, anak muda itu biasanya pantang menyerah, semangatnya tinggi, tidak mudah sakit, daya tahannya kuat," ujar Cak Imin.

"Sehingga Insya Allah kalau kaum muda diopini (diperhatikan, dipelihara) oleh pemerintah, maka kekuatan pemuda ini akan menjadi produktif. Dan insya Allah kekuatan ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi," tandasnya. ● mei



CAK IMIN KUNJUNGI PESANTREN DI PASURUAN Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadiri haul haul Masyayikh ke-21 dan Silaturrohim Nasional Alumni Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini di Pasuruan, Jatim, Minggu (14/1). Jika pasangan Anies-Muhaimin (Amin) memenangkan Pilpres 2024, Cak Imin berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai pusat wisata halal terbesar di dunia.

Tanggapan TPN

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, mengomentari pernyataan Jimly Asshidiqie yang menyebut gerakan

Ganjar Pranowo Siap Adu Gagasan Tentang Isu Anti-Korupsi di KPK

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengaku siap memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beradu gagasan tentang isu antikorupsi.

Agenda adu gagasan tersebut bertajuk 'Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas' (Paku Integritas), digelar di Gedung KPK Jakarta, Rabun (17/1).

"Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu," kata Ganjar, saat ditemui wartawan di Senayan Park (Spark), Jakarta, Minggu (14/1) pagi.

Ganjar mengatakan, soal penguatan isu antikorupsi sudah pernah diikutinya saat berlaga pada Pilkada Jawa Tengah, tahun 2013 lalu. Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah, khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur.

"Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, Pak Ganjar nggak usah karena tag line-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya," katanya.

Ganjar yang terkenal dengan jargon 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' (Tidak korupsi, Tidak membohongi) berhasil membuktikan apa yang dijanjikan kepada konstituen selama menjalani

perannya sebagai orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah.

"Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini saya. Pingin banget menceritakan pengalaman saya ini," ucapnya.

Terkait pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Pada saat itu, kata Ganjar, kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet.

Diungkap, para kernet setiap melewati Jembatan Timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp10.000 hingga Rp20.000.

Setahun berikutnya, pada tahun 2015, kiprah Ganjar dalam memerangi rasuah menandai pujian. KPK memberikan penghargaan. Selain itu, Ganjar juga dikategorikan sebagai Kepala Daerah pe-lapor gratifikasi terbanyak di Indonesia.

Pada Desember 2023, KPK menyoroti Debat Pertama, khususnya mengenai isu pemberantasan korupsi. ● mei